

DISKURSUS GENDER DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Mahathir Muhammad Iqbal
Universitas Islam Raden Rahmat Malang
iqbalz_mm@yahoo.com

Abstrak

Orientasi keberagamaan kita hari ini masih didominasi oleh wacana normatif yang bias kepentingan perempuan. Khususnya menyangkut relasi gender. Kita sebetulnya menyadari bahwa banyak hukum agama, misalnya hukum personal keluarga, praktik keagamaan, dan termasuk pula soal keabsahan kepemimpinan sosial politik apalagi keagamaan bagi perempuan, disusun berdasarkan asumsi patriarkhi dan seksisme. Sistem yang berdasarkan patriarkhi dan seksisme ini, biasanya mengasingkan perempuan di rumah, dengan demikian laki-laki lebih bisa menguasai kaum perempuan. Diskursus gender dalam pendidikan Islam jelas mempunyai relevansi yang sangat penting. Bahkan, wacana gender dan seksisme ini dapat menjadi agenda kajian tentang bentuk kesetaraan baru yang merepresentasikan wacana keadilan dan egalitarianisme. Kajian gender ini, misalnya dapat dijadikan konstruksi paradigma alternatif di tengah menguatnya arus konservatif yang berusaha keras mau mengembalikan peran perempuan ke sektor domestik, dengan berbagai legitimasi pragmatis, keagamaan, ilmu maupun ideologis. Salah satu ikhtiar yang mendesak segera dilakukan ialah bagaimana merumuskan sebuah konsep pendidikan Islam yang berorientasi gender.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Gender, Patriarkhi, Seksisme*

Abstract

Our religious orientation today is still dominated by the bias of the normative discourse of women's interests. Especially regarding gender relations. We actually realize that many

religious law, personal law such families, religious practices, and including also the social and political leadership over the legitimacy of religious especially for women, is based on the assumption of patriarchy and sexism. The system is based on patriarchy and sexism, usually alienate women at home, so men are more able to dominate women. Gender discourse in Islamic education clearly has a very important relevance. In fact, the discourse of gender and sexism can be on the agenda the study of new forms of equality and egalitarianism represents justice discourse. This gender studies, for example, can be used as an alternative paradigm construction amid strong conservative currents would strive to restore the role of women to the domestic sector, with a variety of pragmatic legitimacy, religious, or ideological science. One of the immediate urgent effort is how to formulate a concept of gender oriented Islamic education.

Keywords: *Islamic Education, Gender, patriarchy, sexism*

A. Pendahuluan

Harus diakui bahwa orientasi keberagaman kita hari ini masih didominasi oleh wacana normatif yang bias kepentingan laki-laki. Khususnya menyangkut relasi gender. Kita sebetulnya menyadari bahwa banyak hukum agama, misalnya hukum personal keluarga, praktik keagamaan, dan termasuk pula soal keabsahan kepemimpinan sosial politik apalagi keagamaan bagi perempuan, disusun berdasarkan asumsi patriarkhi dan seksisme.

Sistem yang berdasarkan patriarkhi dan seksisme ini, biasanya mengasingkan perempuan di rumah, dengan demikian laki-laki lebih bisa menguasai kaum perempuan. Sementara itu, pengasingan perempuan di rumah menjadikan perempuan tidak mandiri secara ekonomis, dan selanjutnya tergantung secara psikologis.

Selanjutnya norma-norma moral, sosial dan hukum pun lebih banyak member hak kepada kaum laki-laki daripada perempuan, justru karena alasan bahwa laki-laki memang “lebih bernilai” secara public daripada perempuan. Dalam perkembangannya, patriarkhi dan seksisme ini sekarang telah menjadi istilah terhadap semua sistem kekeluargaan maupun sosial, politik, dan keagamaan yang

merendahkan, bahkan “menindas” kaum perempuan, mulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat.¹

Yang menarik, berdasarkan penemuan penelitian Nasaruddin Umar, pandangan patriarkhi dan seksisme ini bukanlah monopoli Al-Quran saja, yang tidak memberikan yang layak terhadap perempuan, tapi juga Bible dan kitab-kitab suci agama lainnya, seperti kitab Konghucu dan Budha, bahkan kitab klasik seperti Talmud.²

Hal ini disebabkan dua faktor penting yang berkontribusi dalam pembentukan wacana keagamaan yang bias gender tentang perempuan, yakni faktor teologi dan mitos. Yang patut digarisbawahi adalah bukan berarti Al-Quran adalah kitab suci yang patriarkhis dan seksisme. Karena memang tidak ada kitab suci yang diturunkan dalam masyarakat yang hampa budaya. Tidak ada kitab suci yang diturunkan di sebuah wilayah geografis tanpa manusia. Semua kitab suci, termasuk Al-Quran, diturunkan dalam masyarakat yang sudah sarat dengan ikatan-ikatan primordial dan norma kearabannya, karena itu ada pola dialektik tersendiri bagaimana kitab suci menyesuaikan dirinya dengan nilai lokal.

Dalam konteks inilah, diskursus gender dalam pendidikan Islam jelas mempunyai relevansi yang sangat penting. Bahkan, wacana gender dan seksisme ini dapat menjadi agenda kajian tentang bentuk kesetaraan baru yang merepresentasikan wacana keadilan dan egalitarianisme. Kajian gender ini, misalnya dapat dijadikan konstruksi paradigma alternatif di tengah menguatnya arus konservatif yang berusaha keras mau mengembalikan peran perempuan ke sektor domestik, dengan berbagai legitimasi pragmatis, keagamaan, ilmu maupun ideologis.

Yang tak kalah penting, salah satu ikhtiar yang mendesak segera dilakukan ialah bagaimana merumuskan sebuah konsep pendidikan Islam yang berorientasi gender. Hal ini menemukan relevansinya tatkala beberapa waktu yang lalu, sebuah perhelatan besar berupa konferensi internasional diadakan oleh Bibliotheca

¹ Budhy Munawwar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2004). hlm. 530-531.

² Nasaruddin Umar, *Bias Gender Menguat Karena Kultur Lokal*, Jawa Pos, 25 April 2004, hlm. 4.

Alexandrina bekerjasama dengan sejumlah NGO yang konsen pada isu perempuan dan anak, seperti MADA Foundation, serta NGO berbasis hak asasi manusia. Konferensi ini mengambil tema pokok *Menuju Ijtihad Baru Hak Asasi Perempuan*, berlangsung selama dua hari penuh, tanggal 10-11 Maret 2014, bertempat di Bibliotheca Alexandrina, Alexandria, Mesir. Sebuah perpustakaan tertua dengan bangunan modern, didirikan sekitar abad ke-3 sebelum Masehi oleh walikota Athena, terletak di tepi pantai Alexandria, kota terbesar kedua setelah Cairo di Mesir.

Hadir sekitar 200 feminis Muslim, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Peserta datang dari berbagai belahan dunia, kebanyakannya datang dari negara-negara Islam di Timur Tengah. Saya sendirian mewakili Indonesia di forum ini. Sejumlah ulama ternama pun hadir, antara lain mewakili lembaga fatwa Al-Azhar, Mesir, Saudi Arabia, Tunisia, Nigeria, Marokko, Sudan, Kuwait, Yaman, Iraq, Emirates, Jordan, Palestina dan Lebanon. Beberapa cendekiawan tercatat, seperti: Dr. Ismail Serageldin, Dr. Assem Hefny, Dr. Amr al-Wardany (Daar al-Iftaa), Dr. Magdy Ashour (advisor of Grand Mufti Egypt), Dr. Muhammad Salem (Senior Lecturer of Azhar Univ. Egypt), Dr. Muhammad Naguib Awadein (Professor of Sharia, Cairo Univ). Peserta lain adalah Dr. Muhammad Arnaut (Professor at Al-Bayt Univ Jordan); Dr. Ibrahim Al-Bayumi (Egypt); Dr. Suhayla Zain (Saudi Arabia); Dr. Muhammad Abu Zaid (Azhar University); Dr. Zaki al-Milad (Saudi Arabia).

Secara umum, semua peserta menyerukan perlunya menawarkan ijtihad alternatif, ijtihad baru yang lebih kondusif bagi upaya memajukan peradaban Islam, khususnya terkait pemenuhan hak asasi perempuan, relasi gender yang adil dan peningkatan kedudukan perempuan dalam Islam, baik dalam ranah keluarga maupun dalam ranah publik. Semua sepakat perlunya membuka akses dan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah secara luas dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana saudara mereka laki-laki.³

³ Musdah Mulia, Deklarasi Alexandria, <http://www.islamlib.com/?site=1&aid=1888&cat=content&title=klipping>. (Diakses tanggal 20 Maret 2014).

Hanya dengan cara itulah kita dapat mengangkat kemuliaan dan kejayaan Islam sebagai agama yang peduli dan sangat berpihak pada kemaslahatandan kemanusiaan. Islam adalah agama yang ramah terhadap perempuan. Semoga hal ini menjadi isyarat kebangkitan kembali peradaban Islam yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, keadilan dan kemaslahatan untuk semua manusia, tanpa membedakan gender danjenis kelamin!

Salah satu tujuan konferensi, merumuskan Deklarasi Iskandariyah (Alexandria) yang akan menjadi panduan Islami bagi upaya pemenuhan hak asasi perempuan di dunia Islam, membangun kesetaraan gender dan kerja-kerja pemberdayaan perempuan di semua bidang kehidupan dan upaya-upaya membangun interpretasi agama yang lebih akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan sekaligus ramah terhadap perempuan.

B. Wacana Gender

Dalam kamus Inggris-Indonesia, disebutkan bahwa kata gender berasal dari bahasa Inggris *gender* yang berarti “jenis kelamin”.⁴ Arti ini rancu, karena dengan demikian gender disamakan dengan *sex* yang berarti “jenis kelamin”. Kamus Webster menyebutkan bahwa gender adalah “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.⁵ Sedangkan dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.⁶ Hal ini senada dengan pendapat

⁴ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 265.

⁵ Victoria Neufeldt (ed.), hlm. *Webster’s New World Dictionary* (New York: Webster’s New World Clevelanland, 1984), hlm. 561. Kata gender jika ditinjau secara terminologis merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, sedangkan jika dilihat posisinya dari segi struktur bahasa gramatikal adalah bentuk nomina (*noun*) yang menunjuk kepada arti jenis kelamin, *sex* atau disebut dengan *al-jins* dalam bahasa Arab. Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. III (London: McDonald & Evans Ltd., 1980), hlm. 141. Lihat pula Munir Ba’albakiy, *Al-Maurid: Qāmūs Injilizīy Arabīy* (Beirūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1985), hlm. 383.

⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur’an*

Mansour Fakih, bahwa gender adalah “suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural”.⁷

Mansour Fakih dalam buku yang lain mengadopsi pendapat Oakley yang mengatakan gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *social constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan oleh baik kaum laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.⁸ Pandangan ini didukung oleh Zaitunah bahwa gender “merupakan sebuah konstruksi sosial yang bersifat relatif, tidak berlaku umum atau universal”.⁹ Penggunaan kata seks lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang yang meliputi perbedaan komposisi kimia dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sehingga kemudian dengan sadar atau tidak, aspek gender tersebut membawa konsekuensi logis bila ternyata berperan secara tidak adil.

Kata gender dan seks atau jenis kelamin harus dibedakan. Jenis kelamin menunjuk pada pembagian dua kelamin yang berbeda dan merupakan penentuan secara biologis. Jenis kelamin secara permanen tidak akan berubah. Adapun gender adalah sesuatu yang sifatnyamelekat padalaki-laki danperempuanyangdikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Maka gender bukanlah suatu *given* atau kodrat yang tidak bisa dipertukarkan, tetapi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Konstruksi gender bukan melihat manusia dari sisi biologis tetapi lebih kepada konstruksi dari struktur sosial dan budaya. Secara umum, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosialbudaya, sedangkan seks digunakan

(Jakarta: Paramadina: 2001), hlm. 33-34.

⁷ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8.

⁸ Mansour Fakih, et al., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 46.

⁹ Zaitunah, *Tafsir Kebencian; Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1993), hlm. 5.

untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari sisi anatomi biologi.

Simbol dalam kehidupan sangat memengaruhi keberadaan gender. Laki-laki diidentikkan dengan kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentikkan dengan kewanitaian (*femininity*). Persepsi yang dilekatkan pada perempuan adalah sebagai makhluk lemah lembut, cantik, manja, penakut, mudah terbawa emosi dan penuh kasih sayang. Sebaliknya laki-laki adalah rasional, bertubuh kuat, perkasa, pemberani, tegas dan agresif.¹⁰ Anggapan-anggapan budaya seperti ini dengan sendirinya memberikan peran yang berbeda dan lebih luas kepada laki-laki, karena laki-laki mendapat status nilai sosial yang relatif tinggi dibandingkan perempuan.¹¹

Perbedaan gender tidak akan menjadi masalah apabila tidak melahirkan ketidakadilan gender. Akan tetapi ternyata justru perbedaan gender tersebut telah melahirkan berbagai ketidakadilan baik untuk kaum laki-laki terlebih untuk kaum perempuan. Ketidakadilan gender ini dapat merubah seluruh sistem dan struktur kebudayaan yang mengorbankan laki-laki dan perempuan itu sendiri. Ketidakadilan gender terwujudkan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu: *marjinalisasi* atau pemiskinan ekonomi, *subordinasi* atau menjadi “manusia kedua”, *stereotype* atau pelabelan negatif, kekerasan dan *multi burden* atau beban kerja yang lebih panjang waktunya dan lebih banyak jenisnya. Subordinasi terjadi pada perempuan di saat pengambilan keputusan, yang memposisikan perempuan sebagai manusia kedua setelah laki-laki. Sehingga hak perempuan berada di bawah dominasi laki-laki dan daya tawarnya sangat rendah.¹² Stereotype secara umum adalah

Pelabelan atau penandaan negatif terhadap kelompok tertentu. Pelabelan ini biasanya sangat merugikan. Pelabelan yang terjadi pada masalah gender misalnya adalah predikat yang

¹⁰ Judi Wacjman, *Feminisme Versus Teknologi* (Yogyakarta: SBPY, 2001), hlm. 10.

¹¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 35-36.

¹² Susilaningsih dkk., *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill IISEP, 2004), hlm. 13.

dilekatkan pada perempuan bahwa perempuan itu keberadaannya selalu membawa masalah dan bencana, emosional, lemah dan tidak berdaya.

Kekerasan adalah bentuk ketidakadilan gender yang baru saja diperhatikan secara istimewa oleh pemerintah dengan ditetapkannya undang-undang penghapusan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam UU RI No. 23 Tahun 2004. Pada dasarnya kekerasan adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Bentuk kejahatan yang dikategorikan kekerasan gender adalah kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan dan pelecehan seksual, pelacuran, pornografi, dan pemaksaan sterilisasi reproduksi.¹³

Multi burden terjadi pada perempuan yang bekerja di luar rumah atau lebih dikenal dengan istilah wanita karir. Sebagai ibu rumah tangga ia sudah dibebani pekerjaan domestik seperti, menjaga kebersihan rumah mulai dari menyapu, mengepel, mencuci maupun mempersiapkan makanan keluarga. Padahal ia juga berusaha untuk mencari penghasilan keluarga dengan bekerja di wilayah publik. Apalagi keadaan seperti ini diperkuat adanya pandangan masyarakat bahwa “pekerjaan perempuan” adalah semua pekerjaan domestik yang dianggap lebih rendah dibandingkan “pekerjaan laki-laki” di wilayah publik, sehingga pekerjaan perempuan bukan pekerjaan utama dan menyebabkan upahnya lebih rendah. Apalagi pekerjaan domestik perempuan dalam keluarga mereka tidak pernah dibayar. Hal ini semakin memperburuk keadaan perempuan.¹⁴

C. Kurikulum Berorientasi Gender

Elliot sebagaimana dikutip Susilaningsih menyatakan bahwa kurikulum sesungguhnya menggambarkan dan mencerminkan sikap dan pandangan yang ada di kelas, lembaga pendidikan, masyarakat, dan negara mengenai isu-isu tertentu.¹⁵ Oleh karena itu, kurikulum hendaknya menggambarkan tujuan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan kehendak manusia yang

¹³ www.menegpp.go.id, (Diakses pada 20 Maret 2015).

¹⁴ Gadis Arivia, *Feminisme; Sebuah Kata Hati*, hlm. 384.

¹⁵ Susilaningsih, et.al., *Kesetaraan Gender*, hlm. 31.

membuat kurikulum. Manusia siapapun dan dimanapun pada dasarnya menghendaki terwujudnya masyarakat yang adil, tanpa diskriminasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin.

Pengembangan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan diaktualisasikan dalam kurikulum. Dengan kata lain, kurikulum menggambarkan dan menterjemahkan visi dan misi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan salah satu implementasi dari tugas manusia sebagai *khalifah* di bumi. Corak penerima tugas itu berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam hal inilah maka sistem dan tujuan pendidikan masing-masing masyarakat berbeda, bukan hasil ekspor atau impor, tetapi ia harus timbul dari dalam masyarakat pendidikan itu sendiri.¹⁶

Kurikulum dijabarkan dalam tujuan pembelajaran, materi, dan topik bahan bacaan atau referensi yang dipakai, strategi pembelajaran, media atau sarana dan prasarana yang digunakan dan evaluasi. Lembaga pendidikan yang memerhatikan kesetaraan gender akan mencantumkan upaya kesetaraan gender ini sebagai bagian dari visi dan misinya, yang kemudian akan terimplementasikan melalui kurikulum beserta komponen-komponennya. Pada umumnya isi kurikulum adalah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan, tetapi kurikulum sebenarnya tidak harus berupa nama mata pelajaran, ia dapat saja berupa nama kegiatan.¹⁷

Untuk memasukkan materi-materi gender dalam sebuah kurikulum,¹⁸ maka diperlukan strategi dan kerangka kerja yang dibagi dalam empat level yang saling berhubungan sebagaimana berikut:

¹⁶ M. Quraish Shihab, "Konsep Pendidikan dalam al-Qur'an", dalam *Membumikan Al-Qur'an*. (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 173.

¹⁷ Waryono Abdul Ghafur (Ed). "*Isu-isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*" (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan MacGill IISEP, 2004), hlm. Xii.

¹⁸ Khusnul Khotimah, "Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan", dalam *Jurnal Insania, vol 13*(Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2008), hlm. 5.

1. Contributions Approach

Pendekatan ini dilakukan oleh sistem dan kebijakan yang ada pada lembaga pendidikan melalui kurikulum. Masalah-masalah gender telah dimasukkan secara eksplisit dalam kurikulum yang ada. Pendekatan model ini sudah diberlakukan antara lain di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Indonesia Jakarta. Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan UIN Syarif Hidayatullah perumusan kurikulum berperspektif gender tercermin dalam berbagai mata kuliah yang memunculkan materi gender secara eksplisit. Hasil dari rumusan kurikulum berperspektif gender tersebut merupakan sebuah capaian yang baik dari kebijakan pimpinan dalam rangka membangun kesetaraan gender.¹⁹ Sementara di Universitas Indonesia untuk program Pascasarjana,²⁰ perumusan kurikulum tersebut lebih diperkuat lagi, karena ditunjukkan dalam program studi Kajian Wanita. Dalam program tersebut terdapat mata kuliah yang jumlahnya 40-46 sks, semua mata kuliah tersebut menggunakan perspektif gender.

2. Additive Approach

Dalam pendekatan ini variasi dan perspektif lain ditambahkan pada kurikulum tanpa merubah struktur kurikulum yang ada secara umum. Pemikiran dan ide-ide baru mengenai gender dapat dimasukkan dan dikaitkan dengan kurikulum yang ada. Pemakaian jenis kurikulum ini secara umum yang masih dipergunakan di lembaga pendidikan yang belum memberlakukan kebijakan kurikulum berperspektif gender secara eksplisit. Hal ini tergantung pada kepekaan para pendidik tentang gender. Bagi pendidik yang telah mengetahui tentang gender, baik secara kognisi, afeksi, dan psikomotor serta sering mengikuti kegiatan pelatihan gender akan memasukkan kurikulum gender dalam materi ajarnya, dengan tidak mengubah kurikulum secara umum.

¹⁹ Susilaningsih, dkk. *Kesetaraan Gender*; hlm. 182.

²⁰ Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 30 Mei 2010 (<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kw--kurikulum.htm>). (Diakses pada tanggal 22 Maret 2015)

3. Transformational Approach

Pada pendekatan ini tujuan, struktur, dan perspektif yang ada dalam kurikulum semuanya dirombak dan diganti dengan tujuan dan perspektif yang sensitif gender. Pengajaran dalam kurikulum ini dengan melihat mata kuliah yang ada kemudian silabinya diubah, baik dalam struktur, tujuan, dan perspektifnya yang berkaitan dengan isu-isu gender. Sebagai contoh pada mata kuliah akhlak tasawuf yang termasuk dalam mata kuliah pendukung, yang harus dipelajari oleh seluruh mahasiswa. Mata kuliah Akhlak Tasawuf tidak hanya berisi tentang ajaran normatif, tetapi diharapkan benar-benar dapat teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja karena Akhlak Tasawuf lebih berkaitan dengan dimensi esoteris Islam, tentu tidak memasukkan isu-isu gender di dalamnya, tetapi bagaimana memasukkan pandangan-pandangan sufistik tentang perempuan dengan penekanan yang jelas, serta meluruskan pendapat-pendapat yang bias gender.²¹

4. Social Action Approach

Pada pendekatan ini siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan tindakan yang sensitif gender dalam aktivitas kehidupan mereka. Hal ini dilakukan dengan cara mendiskusikan dalam kelas mengenai konsep, peran dan relasi gender dalam masyarakat, seperti mengapa terjadi diskriminasi terhadap perempuan, apa yang menyebabkan adanya diskriminasi itu dan bagaimana keadaan dalam kelas apakah ada diskriminasi, dan bagaimana diskriminasi itu harus disikapi. Dengan pendekatan ini dimaksudkan supaya siswa dapat melakukan kritik sosial bahkan dapat melakukan perubahan sosial.²²

D. Model Pembelajaran Responsif Gender

Joyce mengemukakan ada empat rumpun model pembelajaran yakni rumpun model interaksi sosial, model pemrosesan informasi, model pengembangan pribadi dan model

²¹ Syahrul Adam, "Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf", dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender* (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005), hlm. 94.

²² Susilaningsih, dkk, *Kesetaraan Gender*, hlm. 33.

behavior.²³ Dari beberapa model tersebut dapat dimodifikasi beberapa model pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran yang lebih responsif gender, di antaranya:

1. Model *Classroom Meeting*

Ahli yang menyusun model ini adalah William Glasser. Menurut Glasser dalam Moejiono, sekolah umumnya berhasil membina perilaku ilmiah, meskipun demikian adakalanya sekolah gagal membina kehangatan hubungan antar pribadi.²⁴ Kehangatan hubungan pribadi bermanfaat bagi keberhasilan belajar, agar sekolah dapat membina kehangatan hubungan antar pribadi, maka syaratnya: (a) guru memiliki rasa keterlibatan yang mendalam, (b) guru dan siswa harus berani menghadapi realitas, dan berani menolak perilaku yang tidak bertanggung jawab, dan (c) siswa mau belajar cara-cara berperilaku yang lebih baik. Agar siswa dapat membina kehangatan hubungan antara pribadi, guru perlu menggunakan strategi mengajar yang khusus. Model pertemuan tatap muka merupakan salah satu model yang bermanfaat bagi pembinaan kehangatan hubungan antar pribadi. Model pertemuan tatap muka adalah pola belajar mengajar yang dirancang untuk mengembangkan (1) pemahaman diri sendiri, dan (2) rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok. Strategi mengajar model ini mendorong siswa belajar secara aktif- Model ini merupakan salah satu model yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pembelajaran yang responsif gender karena lebih menekankan pada proses. Pendekatan yang berorientasi pada proses dapat memberikan pengalaman belajar langsung pada diri siswa baik dalam sikap dan pola pikir yang peka terhadap keadilan dan kesetaraan gender.

Kelemahan model ini terletak pada kedalaman dan keluasan pembahasan materi, karena lebih berorientasi pada proses, padahal dalam kenyataannya untuk pembelajaran pada tingkat dasar, banyak ditemukan materi yang bias gender. Sehingga

²³ Weill B. Joyce, *Model of Teaching*(Boston: Allyn and Bacon, 2000), hlm. 67.

²⁴ Moejiono. *Strategi Belajar Mengajar* (Jakarta: Ditjen Dikti Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan 1991/1992), hlm. 155.

untuk pembelajaran yang responsif gender juga menekankan pada penguasaan materi yang lebih dalam berdasarkan keadilan gender, sehingga materi perlu dikaji secara mendalam agar dapat dipahami dan dihayati serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Model *Cooperative Learning*

Model *cooperative learning* dikembangkan salah satunya oleh Roben E. Slavin. Model ini membagi siswa dalam kelompok-kelompok diskusi, di mana satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Model ini akan membuka suasana belajar yang berkembang, merangsang dan meningkatkan motivasi siswa dalam belajar.²⁵ Dewasa ini proses belajar mengajar di lingkungan sekolah masih diwarnai oleh penekanan pada aspek pengetahuan dan masih sedikit melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar itu sendiri. Di samping itu pembelajaran yang dilakukan guru belum mampu menumbuhkan budaya belajar di kalangan siswa. Hal ini akan berpengaruh secara langsung terhadap perolehan dan hasil belajar siswa. Model ini menawarkan adanya keaktifan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.

Kelemahan model ini lebih karena terfokus pada bagaimana mengaktifkan siswa dan mampu bekerjasama, tetapi tidak membahas materi pembelajaran sehingga organisasi materi tidak menjadi perhatian, masih mengutamakan penguasaan materi secara terpisah-pisah, dengan demikian pembelajaran belum dapat memberikan makna bagi peserta belajar. Di samping itu pembelajaran dengan materi yang terpisah-pisah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami permasalahan secara utuh. Namun begitu model ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan pada pembelajaran yang responsif gender, karena dalam proses belajar yang terbagi dalam kelompok-kelompok kecil dapat memungkinkan untuk memberikan perlakuan-perlakuan terhadap siswa secara adil gender.

3. Model *Integrated Learning*

Model pembelajaran terpadu pada hakekatnya merupakan

²⁵ Salamah, "Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender pada Madrasah Ibtidaiyah di Kalimantan Selatan", dalam *Jurnal Khazanah* (Banjarmasin: P3M IAIN Antasari, 2006), hlm. 11.

suatu sistem pembelajaran dengan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk keseluruhan dan meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran/sub mata pelajaran. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa baik individual maupun kelompok, aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, dan otentik.²⁶ Pembelajaran terpadu salah satu di antara maksudnya juga adalah “memadukan pokok bahasan atau sub pokok bahasan antar bidang studi, atau yang disebut juga lintas kurikulum, atau lintas bidang studi”.²⁷

Pembelajaran akan lebih efektif apabila guru dapat menghubungkan atau mengintegrasikan antara pelaksanaan pembelajaran di sekolah dengan temuan di lapangan. Kurikulum terpadu dapat diartikan sebagai suatu model yang dapat memadukan materi dalam bahan pembelajaran. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan guru untuk mengintegrasikan antara materi pelajaran dalam pembelajaran dengan lingkungan kehidupan siswa.

E. Faktor Dasar Ketidakadilan Gender dalam Pendidikan

Faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam empat faktor mendasar, yaitu: partisipasi, akses, control, dan manfaat.

1. Faktor Partisipasi

- a. Kesenjangan angka partisipasi pendidikan menurut jenis kelamin di SD lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dari pada oleh ketidaksetaraan fasilitas pendidikan yang sudah tersebar relatif merata. Faktor-faktor sosial budaya tersebut antara lain adalah nilai dan sikap yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat berkaitan dengan fungsi dan peran anggota masyarakat sesuai dengan jenis kelamin. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa laki-laki adalah penopang ekonomi keluarga (*bread*

²⁶ Tim Pengembang PGSD, *Pembelajaran Terpadu DII PGSD dan S-2 Pendidikan Dasar* (Jakarta: Dikti, 1996), hlm. 3.

²⁷ Maryanto, *Kurikulum Terpadu* (Bandung: UPI, 1994), hlm. 3.

winner), dan oleh karena itu laki-laki lebih penting untuk memperoleh pendidikan dari pada anak perempuan yang dianggap lebih berperan dalam lingkungan keluarga (*domestic function*). Faktor nilai sosial budaya ini berkaitan dengan faktor ekonomi. Misalnya, jika ketersediaan biaya sekolah terbatas, maka sebagian besar keluarga akan lebih memilih anak laki-laki sebagai prioritas untuk bersekolah dari pada anak perempuan.

- b. Sebaliknya, faktor kesenjangan pendidikan di SLTP menunjukkan kecenderungan yang sedikit berbeda. Perbedaan kesempatan memperoleh pendidikan menurut jenis kelamin di SLTP cenderung lebih dipengaruhi oleh kondisi keterjangkauan fasilitas pendidikan atau jarak antara rumah dan sekolah, terutama di daerah-daerah pedesaan terpencil yang sulit dijangkau. Faktor kondisi keterjangkauan fasilitas pendidikan dapat memperkecil kemungkinan bagi perempuan untuk bersekolah.
- c. Kesempatan belajar di SMU sudah mulai menunjukkan keseimbangan gender. Namun berbagai gejala yang ditemukan menunjukkan bahwa perempuan kurang terwakili (*under represented*) dalam komposisi siswa di SMK dan pendidikan tinggi. Gejala tersebut merupakan akibat dari adanya stereotype dalam masyarakat tentang peran gender. Perempuan lebih banyak terdaftar pada jurusan atau program studi ilmu-ilmu perilaku dan pelayanan sosial, seperti psikologi, ilmu pendidikan, perawat kesehatan, dan bisnis. Sementara itu, laki-laki mendominasi jurusan atau program studi ilmu-ilmu murni dan “ilmu-ilmu keras” (*basic sciences and hard sciences*), seperti ilmu pengetahuan alam, otomotif, teknik sipil, dan teknologi industri.
- d. Disamping lebih rendahnya angka partisipasi perempuan pada setiap jenjang pendidikan, laki-laki cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena nilai budaya dan sikap masyarakat yang menganggap peran laki-laki lebih penting dalam berbagai dimensi kehidupan. Laki-laki masih dominan berperan sebagai kepala keluarga,

pemimpin masyarakat, serta pemimpin dalam berbagai lembaga birokrasi.

- e. Perempuan lebih mampu bertahan di sekolah dan menyelesaikan studi dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan karena jumlah perempuan masih sedikit dalam komposisi siswa sekolah. Untuk itu partisipasi perempuan telah terseleksi secara baik. Disamping itu, perempuan dianggap memiliki karakteristik yang dapat mendorong keberhasilan mereka, seperti ketelitian, ketekunan, kesabaran, dan kesungguhan yang lebih menonjol daripada yang dimiliki laki-laki.

2. Faktor Akses

- a. Akses perempuan dalam penulisan buku pelajaran yang terbatas menyebabkan proporsi penulis buku pelajaran didominasi oleh laki-laki yang belum responsif gender sangat besar, yakni 85%.
- b. Terdapat keterbatasan akses bagi perempuan untuk menjadi tenaga pengajar terutama untuk pada SLTP ke atas. Akibatnya, proses pembelajaran belum berorientasi terhadap kesetaraan gender, serta lebih menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan (*bias agains female*). Hal ini diperparah lagi oleh kesadaran guru akan kesetaraan gender yang masih rendah.
- c. Akses bagi perempuan terhadap jurusan-jurusan ilmu dasar seperti fisika, kimia, biologi, serta ilmu-ilmu keras seperti teknologi dan industri masih rendah. Hal ini bukan diakibatkan oleh sistem seleksi masuk perguruan tinggi, melainkan lebih disebabkan oleh rendahnya proporsi perempuan yang memilih jurusan IPA atau Matematika di SMU.

3. Faktor Kontrol

- a. Dalam keluarga, ayah berfungsi sebagai kepala keluarga. Nilai, sikap, pandangan, dan perilaku ayah sebagai kepala keluarga berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan keluarga, khususnya keputusan untuk memilih jurusan atau keahlian bagi anak-anak. Perempuan yang dianggap pemeran

fungsi domestic (*domestic role*), lebih diarahkan untuk memilih jurusan atau keahlian yang dianggap oleh orang tua sesuai dengan peran jenisnya, seperti psikologi, bahasa dan sastra, dan perawat kesehatan. Di pihak lain, laki-laki yang dianggap penopang ekonomi keluarga (*bread winner*), diarahkan untuk memilih ilmuilmu dasar dan teknologi.

- b. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan masih rendah dibandingkan dengan lakilaki. Keadaan ini dapat memengaruhi kebijakan kependidikan yang kurang sensitif gender, yang selanjutnya dapat membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perempuan.

4. Faktor Manfaat

- a. Pemegang kebijakan dalam struktur pemerintah didominasi oleh laki-laki, khususnya di lingkungan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah perempuan yang memperoleh kesempatan memegang jabatan birokrasi. Dengan latar belakang pendidikan yang kurang, perempuan tertinggal jauh dalam menduduki posisi penting dalam jabatan struktural saat ini. Proporsi pegawai negeri sipil (PNS) perempuan hanya 35,4%. Data juga menunjukkan semakin tinggi golongan jabatan, semakin kecil proporsi perempuan yang ada di dalamnya.
- b. Sebagai akibat dari ketidaksadaran gender dalam pendidikan, serta dalam pemilihan jurusan-jurusan keahlian, maka laki-laki memiliki kesempatan memperoleh keahlian dan status profesional yang tinggi. Akibat lebih lanjut, rata-rata penghasilan lakilaki lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata penghasilan perempuan.

F. Penutup

Berdasarkan kenyataan tentang kesenjangan gender dalam pendidikan Islam dan faktor-faktor yang memengaruhinya, dapat diidentifikasi beberapa masalah gender dalam pembangunan pendidikan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, yaitu: *pertama*, Kesenjangan gender paling menonjol terjadi di tingkat SD, SMK, dan PT, tetapi lebih seimbang pada SLTP dan SMU.³⁷

Namun demikian, masih terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin lebar kesenjangan gender. *Kedua*, buku-buku mata pelajaran yang bias gender, khususnya yang berhasil diamati pada mata pelajaran-mata pelajaran umum, seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Jasmani, dan mata pelajaran agama, seperti Pendidikan Agama Islam, Fiqh, Aqidah Akhlak dan Tafsir, akan mempertahankan kesenjangan gender dalam waktu yang lama. *Ketiga*, rendahnya angka partisipasi perempuan dalam pendidikan akan mengakibatkan proses pembelajaran menjadi kurang efisien. Padahal, kemampuan perempuan relatif lebih tinggi untuk bertahan dan menyelesaikan studi. Hal ini dibuktikan oleh lebih rendahnya angka putus sekolah dan angka mengulang kelas bagi murid perempuan dibandingkan murid laki-laki, serta lebih tingginya angka kelulusan dan angka bertahan (*retention rate*) murid perempuan dibandingkan murid laki-laki. *Keempat*, posisi perempuan yang kurang strategis dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan mengakibatkan kesenjangan gender terlembagakan (*institutionalized*) dalam berbagai dimensi sistem pendidikan. Sikap para pengelola dan pelaksana pendidikan yang masih bias gender secara konsisten dan berkesinambungan mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender yang bertahan dalam waktu yang lama. *Kelima*, pemenuhan kebutuhan praktis gender (*practical gender needs*). Kebutuhan ini bersifat jangka pendek dan mudah dikenali hasilnya. Namun usaha untuk melakukan pembongkaran bias gender harus dilakukan mulai dari rumah tangga dan pribadi masing-masing hingga sampai pada kebijakan pemerintah dan negara, tafsir agama bahkan epistemologi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Syahrul. "Isu-isu Gender dalam Mata Kuliah Tasawuf", dalam *Membangun Kultur Akademik Berperspektif Gender*. Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, Departemen Agama, UIN Syarif Hidayatullah, CIDA dan McGill, 2005.
- Arivia, Gadis. *Feminisme; Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Ba'albakiy, Munir. *Al-Maurid: Qāmūs Injilizīy Arabīy*. Beirut: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1985.
- Bryan, Janice Westlund dan Zella Luria, "Sex-Role Learning: A Test of Selective Attention Hypothesis. *Child Development*, Vol. 49. Chicago: University of Chicago Press, 1978.
- Echols, John M. Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Fakih, Mansour. et al. *Membincang Feminisme: Diskursus Jender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ghafur, Waryono Abdul. (Ed). *Isu-isu Gender Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan MacGill IISEP, 2004.
- http://www.datastatistikindonesia.com/component/option,com_tabel/kat,3/idtabel,311/Itemid,181/
- Joyce, Weill B. *Model of Teaching*. Boston: Allyn and Bacon, 2000.
- Kagan, Jerome dan Cynthia Lang, *Psychology and Education: An Introduction*. New York: Harcourt Brace Javanovich, Inc, 1984.
- Khotimah, Khusnul. "Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan", dalam *Jurnal Insania*, Vol. 13. Purwokerto: P3M STAIN Purwokerto, 2008.
- Maryanto. *Kurikulum Terpadu*. Bandung: UPI, 1994.

- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender*. Bandung: Mizan, 1999.
- Moejiono. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pembinaan Tenaga Kependidikan, 1991/1992.
- Muhaimin. *Rekonstruksi Pendidikan Islam, Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum Hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa: 2009.
- Murniati. “Perempuan Indonesia dan Pola Ketergantungan”, dalam
- Budi Susanto, et.al. (Ed.). *Citra Wanita dan Kekuasaannya, Seri Siasat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Muthali'in, Achmad. *Bias Jender dalam Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001.
- Neufeldt, Victoria. ed. *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 30 Mei 2010 (<http://www.pps.ui.ac.id/ui/kw--kurikulum.htm>)
- Roqib, Moh. *Pendidikan Perempuan*. Yogyakarta: Gama Media dengan STAIN Purwokerto, 2003.
- Salamah. “Pengembangan Model Pembelajaran Responsif Gender pada Madrasah Ibtidaiyah di Kalimantan Selatan”, dalam *Jurnal Khazanah*. Banjarmasin: P3M IAIN Antasari, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2002.
- Suhartini. “Dimensi Gender dalam Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Rawan Longsor”, dalam *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Sumbulah, Umi. et.al. *Spektrum Gender Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi*. Malang: Penerbit UIN Malang Press, 2008.
- Suryadi, Ace dan Cecep Idris, *Kesetaraan Jender dalam Bidang Pendidikan*. Bandung: Genesindo, 2004.

- Susilaningsih, et.al. *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dengan McGill IISEP, 2004.
- Tafsir, Ahmad. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006.
- Tim Pengembang PGSD, *Pembelajaran Terpadu DII PGSD dan S-2 Pendidikan Dasar*. Jakarta: Dikti., 1996.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina: 2001.
- Wacjman, Judi. *Feminisme Versus Teknologi*. Yogyakarta: SBPY, 2001
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, cet. III. London: McDonald & Evans Ltd., 1980.
- Zaitunah. *Tafsir Kebencian; Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1993.

